

**Pasang Surut Politik Islam:  
Strategi Partai Islam Melawan Partai Nasionalis di Jawa Tengah-  
Yogyakarta Pada Pemilu 1955**

**Subandi Rianto**

Alumni S2 Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada  
[Email: [subandi.rianto@mail.ugm.ac.id](mailto:subandi.rianto@mail.ugm.ac.id)]

***Abstract***

*This research is a historical study of the campaign strategy of Islamic parties against the Nationalist party in the Yogyakarta-Central Java electoral district in the 1955 election. It uses literature studies on archives and previous scientific studies of the 1955 election process in the Yogyakarta-Central Java electoral district, as well as a conceptual approach to contestation. The results of the research conclude that Islamic parties need a lot of strategic models in gaining votes on secular nationalist bases. One of them is by solving internal problems in sharpening external strategies.*

**Keywords:** *constestation, election, Islam, nationalist, party*

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan kajian sejarah mengenai strategi kampanye partai-partai Islam dalam melawann partai nasionalis di daerah pemilihan Jawa Tengah-Yogyakarta pada pemilu 1955. Menggunakan studi pustaka komparasi kajian ilmiah terdahulu terhadap proses pemilu 1955 di wilayah daerah pemilihan Yogyakarta-Jawa Tengah serta pendekatan konseptual mengenai kontestasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partai-partai Islam memerlukan banyak model strategi dalam meraup suara di basis-basis nasionalis sekuler. Salah satunya dengan menyelesaikan masalah-masalah internal dalam mempertajam strategi eksternal.

**Kata Kunci** : kontestasi, pemilihan, Islam, nasionalis, sekuler

## PENDAHULUAN

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan oleh Indonesia secara nasional, karena sebelumnya telah diadakan pemilihan umum tingkat lokal pada tahun 1951 di Yogyakarta dan Sulawesi. Pemilihan umum nasional ini berlangsung berjenjang dari daerah yang terbagi ke dalam beberapa daerah pemilihan yang disebut dengan distrik yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Tengah, Sulawesi Selatan dan Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Pemilu yang diadakan di masa Kabinet Burhanudin Harahap ini dinilai menjadi pemilu paling demokratis dan pemilu tersibuk yang pernah diselenggarakan di masa Pemerintahan Presiden Soekarno. Persiapan pemilu perdana nasional ini

telah dimulai sejak masa Pemerintahan Ali Sastroamijoyo, dan bahkan sejak lahirnya Maklumat No X November 1945 yang dikeluarkan Wakil Presiden Mohammad Hatta, gagasan mengenai pemilihan umum langsung telah diusulkan dan ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat Januari 1946.<sup>1</sup>

Maklumat X yang diterbitkan Wakil Presiden Mohammad Hatta menjadi dasar lahirnya sistem multipartai di Indonesia. Maklumat ini memerintahkan partisipasi masyarakat dalam membentuk partai politik sebagai bagian dari strategi panjang melahirkan iklim demokrasi di republik yang baru berdiri ini. Namun, proses penyelenggaraan pemilu baru terlaksana sepuluh tahun kemudian di tahun 1955.

Proses ini terjadi karena banyaknya faktor seperti situasi politik yang tidak terkendali, terutama sistem politik Indonesia yang menganut skema demokrasi parlementer sehingga kabinet sering jatuh bangun dan membuat program

---

<sup>1</sup> <https://kab-jembrana.kpu.go.id/page/read/37/pemilu-1955#:~:text=Tetapi%2C%20berbeda%20de>

[ngan%20tujuan%20yang,memilih%20anggota%20Danggota%20Dewan%20Konstituante.](https://kab-jembrana.kpu.go.id/page/read/37/pemilu-1955#:~:text=Tetapi%2C%20berbeda%20de)  
Diakses 7 Juli 2023.

kerja kabinet sering tidak maksimal. Faktor lainnya adalah terkait dengan persoalan anggaran serta kesiapan penyelenggara negara yang belum mumpuni. Berbagai faktor inilah yang menyebabkan pemilihan umum langsung pertama di Indonesia terlaksana sepuluh tahun kemudian dari rencana awal.

Persiapan pendirian payung hukum pemilu 1955 diawali pada program dengan melahirkan undang-undang mengenai pemilu tidak langsung. UU No. 27 tahun 1948 dan dilanjutkan dengan UU No 12 tahun 1949 mengatur penyelenggaraan pemilu dengan sistem bertingkat. Pengaturan ini kemudian dijabarkan dalam program kerja Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman. Serta dilaksanakan secara detail dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo untuk persiapan penyelenggaraan pemilu, hingga pada masa Kabinet Burhanuddin Harapan baru terselenggara pemilu pertama yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia mencoblos

partai untuk perwakilan DPR-RI dan Majelis Konstituante.<sup>2</sup>

Pemilu pertama dan persiapannya ini melahirkan banyak tensi antar partai, terlebih sebelum adanya pemilu langsung telah ada pemilu tidak langsung/bertingkat yang diikuti partai-partai nasionalis, islam dan perwakilan golongan yang ditunjuk oleh pemerintah. Peta persaingan yang semula berlangsung diam-diam karena tidak melibatkan persaingan langsung berubah menjadi persaingan langsung.

Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara nasional terbagi atas distrik-distrik (daerah) pemilihan dengan sistem perwakilan dan berimbang ini diikuti partai-partai nasionalis papan atas seperti Partai Nasional Indonesia dan tiga partai Islam besar seperti Partai Masyumi, Partai Nadhlatul Ulama dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Dua partai Islam terakhir sebelumnya bergabung ke dalam Partai Masyumi sebelum akhirnya memutuskan keluar. PSII keluar dari Masyumi pada tahun 1952 disusul dengan

---

<sup>2</sup> <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>

keluarnya NU pada tahun 1953. Pada posisi ini, partai-partai Islam bukan hanya bersaing melawan partai nasionalis melainkan juga bersaing secara intern terhadap partai-partai Islam dari golongannya sendiri.

Studi ini akan melihat secara makro peta persaingan partai-partai nasionalis dengan partai-partai Islam dalam daerah pemilihan di distrik Jawa Tengah-Yogyakarta meliputi strategi kampanye media dan kultural serta melihat hasil perolehan suara berkaitan dengan basis massa yang dimiliki sebelum pemilu langsung (basis massa pada pemilihan tidak langsung atau bertingkat sebelum diadakan Pemilu langsung 1955).

## **METODOLOGI DAN TEORI**

Jawa Tengah dan Yogyakarta pada masa kontemporer ini dikenal sebagai basis sosio-kultural partai-partai nasionalis. Terlebih dalam pemilihan umum sepuluh tahun terakhir dalam masa Pemerintahan Joko Widodo, daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta dimenangi oleh partai-partai dengan ideologi nasionalis. Partai-partai Islam dalam satu dekade terakhir terlihat

kepayahan dalam meraup suara di dua daerah ini, baik dalam menempatkan perwakilan legislatif tingkat daerah hingga nasional juga dikuasai partai-partai nasionalis.

Namun, menariknya adalah ketika melihat rentang sejarah politik Indonesia yang panjang. Pemilihan langsung uji coba pertama di Surakarta pada 1946 membuktikan daerah-daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta pernah dimenangi oleh partai-partai Islam. Pemilihan langsung uji coba di Surakarta pada 1946 berhasil dimenangi Masyumi dengan menyapu bersih 104 suara dari total 125 kursi (Uji Nugroho, dkk, 2018: 3).

Fakta menarik ini dapat dilihat dengan metodologi studi arsip dan kajian ilmiah yang melibatkan data-data pemilu pra maupun paska pemilu 1955 yang dilaksanakan di Jawa Tengah dan Yogyakarta (saat itu Yogyakarta termasuk dalam distrik pemilu Jawa Tengah).

Kajian ini menggunakan metode analisis terhadap data-data pemilu tahun 1955 yang dihimpun lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah,

---

Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah serta membandingkan dengan arsip-arsip lokal dan nasional serta surat kabar sezaman yang meliput proses pemilihan umum di distrik Jawa Tengah-Yogyakarta.

Kajian ini merupakan bagian dari sejarah politik Indonesia yang mengedepankan pendekatan teoritik wacana kontestasi. Meminjam istilah teori multidimensional yang diperkenalkan Sartono Kartodirjo dalam mengupas kajian sejarah dengan pisau bedah teori-teori sosial. Teori wacana dan kontestasi merupakan alat bantu yang dimiliki ilmu politik untuk menerangkan persaingan dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang berlangsung dalam pemilihan umum 1955.

Sartono Kartodirjo memberikan contoh penggunaan pendekatan multidimensional teori-teori sosial dalam disertasinya mengenai pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Sartono mencontohkan bahwa pemberontakan petani tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal aksi pemberontakan dari kalangan bawah kepada negara

(pemerintah Kolonial Belanda), akan tetapi menjangkau peristiwa sebab-akibat serta konflik antar golongan, konflik antar kelas dan melibatkan banyak aktor-aktor perlawanan bukan hanya petani melainkan juga ulama.

Pada proses analisis yang tidak berbeda, kajian ini juga akan memotret peta persaingan partai-partai nasionalis melawan partai Islam di distrik Jawa Tengah-Yogyakarta dalam memperebutkan kursi pemilu 1955 meliputi kursi DPR-RI dan Majelis Konstituante. Analisis yang sama juga akan melibatkan analisis peran lembaga, aktor serta agensi yang terlibat dalam kontestasi persaingan perebutan suara partai-partai Islam melawan partai nasionalis di distrik pemilihan Jawa Tengah-Yogyakarta.

## **PEMBAHASAN**

### **Seputar Persiapan Pemilu 1955**

Banyak historiografi Indonesia menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 sebagai pemilu pertama yang berhasil diselenggarakan Pemerintah Indonesia paska kemerdekaan tahun 1945. Walaupun pada satu sisi benar,

tetapi dalam sisi yang lain memerlukan perbaikan interpretasi sejarah. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung dengan skup lebih luas bersifat nasional, meskipun demikian telah ada pemilu sebelumnya yaitu pemilu tidak langsung secara bertingkat yang diadakan untuk memilih wakil-wakil parlemen, selain itu juga diadakan pemilu langsung di dua daerah Yogyakarta dan Sulawesi pada tahun 1951 untuk menjadi laboratorium ujicoba pemilu langsung.

Persoalan pemilihan umum langsung yang molor digelar dari Maklumat No X November 1945 salah satunya adalah faktor kekhawatiran masyarakat Indonesia yang saat itu masih banyak buta huruf. Sehingga pemilu langsung dikhawatirkan akan menimbulkan pergolakan politik dan sosial yang luas dan bahkan memicu chaos di masyarakat. Hingga akhirnya semenjak Maklumat X diterbitkan di tahun 1945, amanat pemilihan umum langsung baru digelar di tahun 1955.

Proses penyelenggaraan pemilihan umum 1955 pada awalnya

didahului dengan hadirnya payung hukum bernama Undang-Undang No. 27 tahun 1948 dan dilanjutkan dengan UU No 12 tahun 1949 mengenai penyelenggaraan pemilu dengan sistem bertingkat. Sistem ini kemudian mengalami banyak perubahan dan terakhir diperbaharui pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo.

Faktor terbesar yang menghambat dan menunda terlalu lama proses penyelenggaraan pemilihan umum langsung adalah konflik eksternal dengan datangnya kembali pemerintahan administrasi Belanda dan juga konflik internal di tubuh kabinet. Implikasi Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 serta serangkaian perundingan bipartit diantara keduanya juga menyibukkan kabinert berfokus pada perundingan ketimbang pemilihan umum. Selain itu, pembentukan negara-negara bagian dalam transisi berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) juga mengaburkan semangat menghadirkan pemilihan umum langsung (Feith, 1999: 3).

Namun, dibalik banyak hal yang menunda pelaksanaan pemilu.

Terdapat faktor sejarah lain yang memicu pentingnya percepatan pelaksanaan pemilu langsung. Pada 17 Oktober 1952, sekelompok perwira angkatan bersenjata Republik Indonesia menggelar tank dan mengarahkan moncongnya ke Istana Presiden menuntut pembubaran parlemen. Musababnya para perwira militer ini terlibat keributan dengan DPR-GR terkait masalah internal di tubuh angkatan bersenjata. Peristiwa 17 Oktober 1952 yang memaksa Soekarno keluar dari istana dan menemui rombongan tentara dipicu dari kemarahan perwira angkatan bersenjata karena politisi parlemen terlibat dalam dukung-mendukung konflik internal. Soekarno sendiri menolak membubarkan parlemen atau DPR-GR karena tak mau dianggap sebagai tokoh fasis.<sup>3</sup>

Gerakan 17 Oktober 1952 yang kemudian membuat militer berjarak dengan parlemen menempatkan Kabinet Wilopo yang sedang berkuasa dalam situasi sulit. Berbulan-bulan paska demosntrasi tentara di depan istana, gaung untuk

melakukan pemilihan ulang anggota parlemen terus-menerus muncul. Pada akhirnya, November 1952 secara resmi Kabinet Wilopo mengajukan rancangan undang-undang pemilu langsung kepada parlemen. Undang-Undang ini kemudian disahkan ditahun depannya yaitu 1953.

Kabinet Wilopo berpandangan bahwa pemilihan umum secara langsung dengan mencoblos tanda gambar sudah saatnya digelar. Pemilu ini juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat memilih wakilnya di DPR dan juga Majelis Konstituante sebagai lembaga negara yang ditugaskan menyusun undang-undang dasar. Rancangan undang-undang juga ini mengatur susunan daerah pemilihan yang terdiri atas 16 distrik pemilihan (termasuk di dalamnya Irian Barat) serta susunan panitia pemilihan umum dari tingkat nasional hingga kecamatan (Feith, 1999: xx).

Pada kenyataannya Kabinet Wilopo hanya bisa mengegolkan undang-undang pelaksanaan pemilihan

<sup>3</sup>  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/1>

7/12410771/peristiwa-17-oktober-1952-  
ketika-tank-dan-meriam-mengarah-ke-istana

umum langsung, sementara pembentukan kepanitiannya diselesaikan di masa Kabinet Ali Sastroamijoyo. Hingga proses pelaksanaan pemilu 1955 berhasil dilakukan di masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 berhasil diselenggarakan di 16 distrik daerah pemilihan, terkecuali Irian Barat karena pada saat itu masih dikuasai Pemerintah Kolonial Belanda.

Pemilihan umum 1955 diselenggarakan dengan memilih wakil-wakil rakyat yang ditugaskan di DPR-RI yang berhasil dimenangi oleh Partai Nasional Indonesia disusul Masyumi, NU dan PKI dalam peringkat empat besar secara nasional. Posisi ini juga meraih kondisi yang sama di Konstituante dimana PNI meraih kursi terbesar disusul Masyumi, NU dan PKI (Feith, 1999: 94).

### **Persaingan Kampanye Distrik**

#### **Jawa Tengah-Yogyakarta**

Pemilihan umum 1955 diselenggarakan secara nasional agar masyarakat Indonesia dapat mencoblos langsung tanda gambar

partai/golongan untuk DPR diselenggarakan di 16 distrik pemilihan. Pemilu untuk DPR RI berhasil dimenangi dengan susunan empat besar adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Masyumi, Partai NU dan PKI.

PKI berhasil menyapu bersih 57 dari jumlah total 257 kursi DPR-RI dengan perolehan jumlah suara nasional adalah 8.434.653, di urutan kedua partai Masyumi yang merupakan gabungan dari partai-partai dan ormasi Islam meraup 57 kursi dengan jumlah suara 7.903.886, disusul Nahdlatul Ulama yang sebelumnya pernah bergabung dengan Masyumi tetapi keluar di tahun 1953 dengan raihan kursi 45 (6.955.141 suara) dan bertengger di peringkat keempat adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan raihan kursi 39 kursi (6.179.914 kursi) (Feith, 1999: 84).

Pada distrik daerah pemilihan Jawa Tengah-Yogyakarta, PNI masih perkasa sebagai pilihan pertama masyarakat di Jawa Tengah-Yogyakarta dengan meraup 3.019.568 suara. Perolehan suara di dapil Jawa Tengah-Yogyakarta ini menyumbang



---

lebih dari 30% perolehan suara PNI nasional yang berada di angka 8 juta. Dapat disimpulkan bahwa daerah pemilihan Jawa Tengah-Yogyakarta adalah basis PNI yang cukup besar.

Pada posisi kedua hasil pemilu 1955 di distrik Jawa Tengah-Yogyakarta, Partai Komunis Indonesia meraup suara 2.326.108, lagi-lagi perolehan suara PKI di Jawa Tengah-Yogyakarta juga menyumbang 30% dari angka perolehan nasional. Dapil ini dapat dikatakan sebagai basis nasionalis-komunis dengan melihat angka PNI dan PKI mampu meraup suara di atas 30% dibandingkan dengan 15 distrik pemilihan lainnya.

Pada posisi ketiga, Partai NU meraih 1.772.306 suara di dapil Jawa Tengah-Yogyakarta. Berkebalikan dengan PNI dan PKI, suara NU di daerah pemilihan ini hanya menyumbang 10% dari suara nasional, basis NU lebih banyak disumbang dari daerah pemilihan Jawa Timur yang merupakan basis tradisional lahirnya organisasi massa Nahdlatul Ulama.

Pada posisi keempat, Masyumi memperoleh suara 902.387

yang hanya menyumbang angka kurang dari 5% dari perolehan suara nasional. Basis suara Masyumi lebih banyak didapatkan di Jawa Barat dan Sumatera (Feith, 1999: 96).

Dengan susunan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Jawa Tengah dan Yogyakarta yang dikuasai peringkat pertama dan kedua oleh partai nasionalis dan komunis mengindikasikan bahwa basis ini merupakan basis masyarakat nasionalis yang berorientasi pada kebangsaan dan kebudayaan yang cukup melekat dalam kampanye-kampanye lapangan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan PKI.

Lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana Masyumi dan NU sebagai representasi partai Islam besar berhasil menduduki peringkat ketiga dan keempat dari daerah pemilihan yang menjadi basis dari partai nasionalis seperti PNI dan partai komunis seperti PKI. Sementara basis Masyumi dan NU lebih banyak tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat dan Pulau Sumatera.

Analisis tingginya raihan suara PNI dan PKI di daerah pemilihan Jawa Tengah-Yogyakarta

karena adanya faktor kultural karakter masyarakat Jawa Tengah-Yogyakarta yang banyak didominasi *Abangan*. *Abangan* sendiri sesuai dengan klasifikasi dari Antropolog Clifford Geertz merupakan tipologi masyarakat yang berbasis pada budaya Jawa atau biasa disebut Kejawen, tidak terlalu condong dengan agama (*non-religius*) serta beririsan secara dekat dengan ide-ide nasionalisme Jawa. Sehingga dapat disimpulkan sumbangan karakter masyarakat *Abangan* terhadap kemenangan PNI dan PKI memiliki faktor paling dominan kemenangan di daerah pemilihan Jawa Tengah-Yogyakarta.

Khusus untuk daerah selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta, dengan adanya wilayah Kasunanan Solo dan Kesultanan Yogyakarta beberapa karakternya disumbang faktor kultural priyayi. Otoritas penguasa tradisional yang cenderung mempertahankan struktur birokrasi lokal dimana Yogyakarta sendiri secara nasionalis bergabung dengan Republik Indonesia melalui pernyataan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Dengan demikian dapat

disimpulkan kawasan Yogyakarta yang sepenuhnya dikuasai Kraton Yogyakarta menjadi faktor tambahan tingginya suara pemilu langsung yang memilih partai-partai nasionalis (Uji Nugroho, dkk, 2018: 10).

### **Kontestasi Partai Islam Melawan Partai Nasionalis di Wilayah Jawa Tengah-Yogyakarta**

Rendahnya Masyumi dan NU dalam Pemilu 1955 selain dipengaruhi dengan faktor basis massa yang dikuasai kalangan *Abangan* dan *Priyayi* bangsawan Kraton Kasunanan Solo dan Kasultanan Yogyakarta. Juga dipengaruhi dengan masalah-masalah strategi kampanye partai-partai Islam dan strategi dari partai nasionalis sendiri.

Fakta mengejutkan adalah pemilu langsung bertingkat yang pernah digelar di Yogyakarta pada 7 Oktober 1951 yang menggunakan sistem pemilihan berbasis perwakilan menempatkan Masyumi sebagai pemenang dengan raihan 18 kursi dari jumlah total 40 kursi untuk DPR Provinsi Yogyakarta, sementara itu PNI hanya mampu meraup 4 kursi,

masih kalah dengan PPDI yang merupakan partai bentukan saudara Hamengkubuwono IX yang meraih 7 kursi suara lokal (Biro TAPEM D.I. Yogyakarta, 2017: 257). Perolehan angka Masyumi ini tetap tidak bisa diseleraskan sampai dengan pemilihan umum langsung pada tahun 1955 dimana dalam daerah pemilihan Jawa Tengah dan Yogyakarta Masyumi duduk di peringkat ketiga.

Strategi-strategi massif yang dilakukan partai nasionalis seperti PNI adalah dengan menutup celah-celah suara yang dimiliki kalangan perorangan. Sistem pemilu yang digelar dalam Pemilu 1955 memungkinkan perwakilan golongan dan perorangan mengajukan diri menjadi calon politisi di parlemen. Agar suara-suara yang diperoleh perorangan karena sedikit tidak menjadi sia-sia, PNI dan PKI menjalin kerjasama untuk melimpahkan suara dari perorangan atau golongan ke dalam suara partai. Sebenarnya strategi ini juga dilakukan Masyumi juga, akan tetapi PNI berhasil memaksimalkan terutama di Jawa dan Sumatera, sementara Masyumi melakukan

secara efektif di Indonesia bagian timur (Feith, 1999: 90-93).

Persoalan lain yang menyulitkan Masyumi dan NU memperoleh suara di daerah pemilihan Jawa Tengah-Yogyakarta adanya konflik internal antara juru kampanye keduanya yang meributkan persoalan perbedaan madzab. Partai NU yang dikenal dengan basis massa Islam tradisional tentu saja berbeda dengan madzab Partai Masyumi yang dikuasai kalangan Islam Modernis. Ormas Muhammadiyah yang merupakan anggota istimewa terbesar Masyumi merupakan ormas Islam berhaluan modernis yang tidak berpijak pada keempat madzab yang ada.

Pada kasus lain, rendahnya suara Masyumi dan NU di Jawa Tengah-Yogyakarta karena adanya intimidasi yang meluas dan terstruktur di kalangan aparat desa. Lurah, panewu dan perangkat desa di pedesaan Jawa Tengah kerap melakukan intimidasi, ancaman dan bahkan provokasi yang bersifat massif mulai dari masa menjelang pemilihan hingga pemilihan berlangsung. Provokasi-provokasi

dan ancaman ini seperti penghentian bantuan pangan, kekerasan hingga hadirnya teror fisik dari pemuda-pemuda komunis yang memaksa orang-orang menandatangani pernyataan akan memilih organisasi PKI dalam pemilu (Feith, 1999: 65-70).

Besarnya hegemoni kalangan nasionalis mulai dari penggunaan organisasi perangkat desa dan struktur masyarakat secara massif membuat perolehan suara PNI menjadi paling tinggi di distrik Jawa Tengah dan Yogyakarta. Struktur partai PNI juga mendapat tekanan tinggi dari pemimpin partai, Soekarno ketua umum PNI dan juga Presiden Republik Indonesia memberikan target bagi PNI untuk bisa meraup minimal 20% suara dari tingkat desa dalam pemilu 1955.

Dengan menghasilkan 3 juta suara dari dapil Jawa Tengah-Yogyakarta, maka PNI berhasil memenuhi target capaian kontribusi tidak hanya 20% dari dapil-dapil desa tetapi lebih dari 30% untuk suara nasional. Jika data ini tidak mengikutkan PKI sebagai variabel perhitungan, maka jarak keterpautan

antara suara PNI dengan Masyumi dan NU akan semakin jauh. Suara Masyumi yang sangat kecil hanya mencapai 900.000 untuk dapil yang terdiri dari dua provinsi ini membuktikan bahwa strategi kampanye Masyumi maupun NU kurang efektif dan kurang bertaji.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rendahnya suara partai Islam khususnya Masyumi dan NU di daerah pemilihan Jawa Tengah-Yogyakarta tidak hanya dipengaruhi faktor kampanye dan strategi, melainkan adanya tekanan intimisasi yang bersifat massif dan struktur dari alat penyelenggara negara sehingga membuat para pemilih tertekan untuk memilih. Selain itu, juga dipengaruhi faktor tipologi masyarakat yang secara kultural lebih dekat dengan faktor abangan, non-religius, kejawen dan sebagian terafiliasi dengan priyayi.

## **PENUTUP**

Pemilihan umum 1955 yang dilangsungkan secara nasional dan berlangsung di 16 daerah pemilihan di Indonesia merupakan pemilu pertama dengan kemenangan besar diraih partai nasionalis papan atas yakni

Partai Nasional Indonesia (PNI). Walaupun demikian, pemilu 1955 bukanlah pemilu pertama yang pernah digelar oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena beberapa tahun sebelumnya pada 1951 pernah berlangsung pemilu lokal yang bersifat terbatas di Kediri, Surakarta, Yogyakarta dan juga Sulawesi.

Pemilihan umum 1955 secara nasional memetakan basis-basis pemilih nasionalis yang mayoritas menguasai Jawa Tengah dan sebagian Indonesia Timur. Sementara suara partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU lebih banyak didominasi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera. Pada daerah pemilihan yang menjadi konsentrasi studi di Jawa Tengah dan Yogyakarta, suara pemilu dimenangkan dengan telak oleh PNI dan juga partai berhaluan komunis yakni PKI. Suara partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU hanya meraih suara tipis, jika partai nasionalis mampu menyumbangkan angka 30% dari suara dapil Jawa Tengah-Yogyakarta, maka partai Islam hanya mampu menyumbangkan 5-10% dari perolehan dapil Jawa Tengah-

Yogyakarta terhadap perolehan suara nasional mereka.

Persoalan utama yang dialami partai-partai Islam dalam meraup suara di dapil Jawa Tengah-Yogyakarta adalah mengalami tekanan dan intimidasi serta hadirnya konflik-konflik internal yang membuat strategi kampanye kurang efektif. Masyarakat di Jawa Tengah-Yogyakarta yang menjadi pemilih kerap mendapat intimidasi dari penyelenggara negara yang dikuasai kalangan nasionalis, hadirnya opresor dari pemuda-pemuda komunis menyatroni rumah-rumah warga hingga target capaian dari pemimpin-pemimpin partai nasionalis menyebabkan agitator dan mesin partai nasionalis bergerak kencang.

Pada faktor lain yang cukup besar adalah tipologi masyarakat di Jawa Tengah-Yogyakarta yang didominasi kalangan Abangan, non-religius, bersifat kejawen dengan lebih dekat kepada budaya-budaya Jawa dalam proses kehidupan mereka. Serta beberapa faktor kecil lainnya adalah pengaruh otoritas monarki di Surakarta dan Yogyakarta yang lebih dekat dengan haluan-

haluan nasionalis karena sifat nasionalisme dari para pemimpin tradisional di wilayah tersebut.

[meriam-mengarah-ke-istana](#), Diakses 7 Juli 2023

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Biro Tapem Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. (2018). *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Biro Tapem Pemerintah DIY.

Feith, Herbeth. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Pamungkas, Mudanto. 2019. *Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. Jakarta: Arsip Nasional Indonesia

Nugroho, Uji, dkk. 2018. *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 dan 1955 di Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

### Website

<https://kab-jembrana.kpu.go.id/page/read/37/pemilu-1955#:~:text=Tetapi%2C%20berbeda%20dengan%20tujuan%20yang,memilih%20anggota%2Danggota%20Dewan%20Konstituante>. Diakses 7 Juli 2023.

<https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>, Diakses 7 Juli 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/12410771/peristiwa-17-oktober-1952-ketika-tank-dan->